

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan pembangunan manusia yang baik optimal, sumber daya manusia akan semakin berkembang sehingga individu memiliki kompetensi, wawasan, dan daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. SDM yang berkualitas akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan inovasi, serta mempercepat kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Menurut Theodore Schultz ia berpendapat bahwa sumber daya manusia bukan hanya sebagai tenaga kerja biasa, akan tetapi juga asset yang harus diinvestasikan pada pendidikan, pelatihan dan kesehatan sehingga akan meningkatkan produktivitas pada sumber daya manusia. Menurutnya, sumber daya manusia lebih penting dibandingkan dengan modal fisik karena negara yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusianya akan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

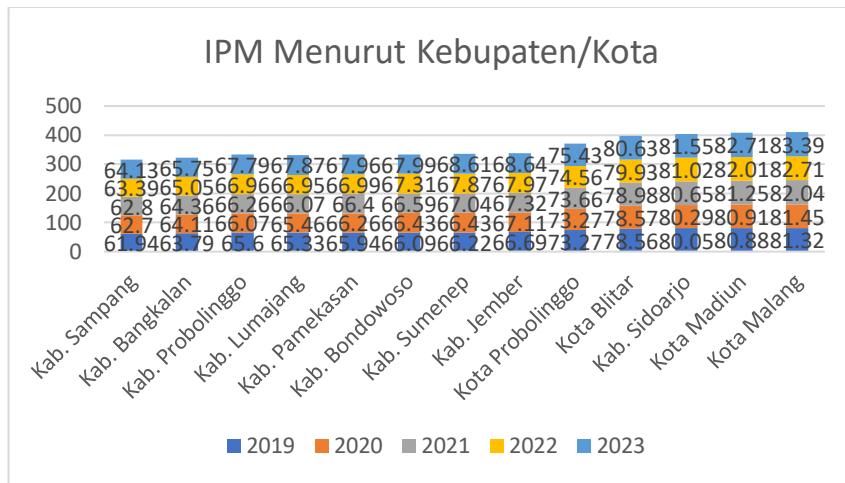
Sumber daya manusia yang baik merupakan cerminan bahwa daerah tersebut sudah maju, seperti dalam pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintah akan memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Kemakmuran pada suatu daerah akan mendatangkan

kesejahteraan pada daerahnya. Dalam konteks pembangunan, manusia memegang peran sentral karena mereka tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi penggeraknya (Cahyani & Sishadiyati, 2022).

Indikasi bahwa daerah dinegara tersebut sudah maju atau tidaknya terdapat pada kualitas pembangunan manusianya. Semakin baik indikator pembangunan manusia pada daerah tersebut maka semakin baik juga SDM pada masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia atau IPM memiliki fungsi sebagai tolak ukur apakah daerah tersebut sudah memiliki efektivitas pembangunan yang menyeluruh.

United Nations Development Programme atau UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam konsep pembangunan manusia menurut UNDP menitikberatkan pada peningkatan pilihan dan kesempatan bagi individu agar dapat lebih mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk menilai kemajuan pembangunan di suatu negara atau wilayah, UNDP merancang Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator yang mengukur kesejahteraan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Jika ketiga aspek utama tersebut dapat ditingkatkan, maka nilai IPM akan mengalami peningkatan. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi merefleksikan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Bustamam et al., 2021).

Grafik 1. 1 IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



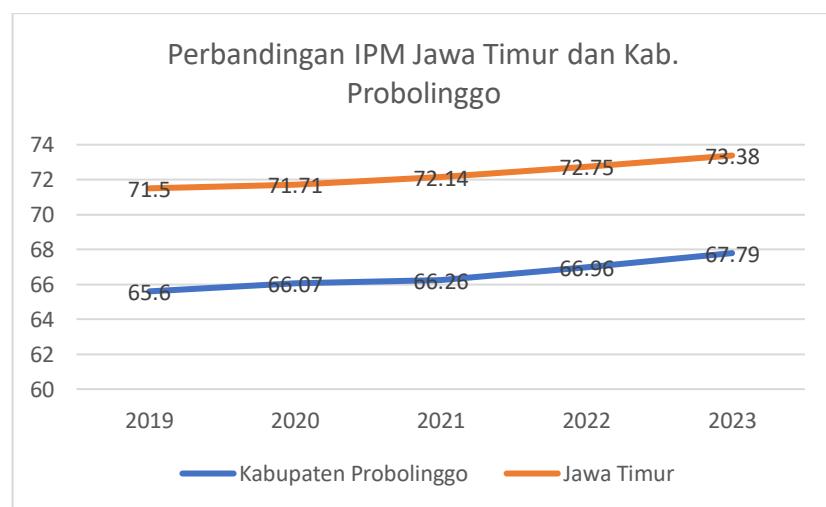
Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IPM beberapa Daerah provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pada setiap tahun. Akan tetapi, beberapa daerah diwilayah Provinsi Jawa Timur memiliki IPM yang nilainya sangat rendah dari rata-rata IPM Provinsi. Salah satunya adalah Kabupaten Probolinggo. Daerah ini menempati IPM terendah ke tiga diantara 38 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Walaupun setiap tahunnya IPM Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa IPM daerah tersebut masih dalam kategori wilayah dengan IPM yang rendah di Provinsi Jawa Timur.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Probolinggo adalah indeks pendidikan yang masih berada pada posisi ketiga terbawah di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan adanya sejumlah permasalahan terkait kualitas dan akses pendidikan di daerah tersebut, termasuk rendahnya tingkat partisipasi sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal utama

peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan. Para akademisi dan praktisi pembangunan menekankan bahwa gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong perubahan positif yang berkelanjutan.

Grafik 1. 2 Perbandingan IPM Jawa Timur Dan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan antara indeks pembangunan manusia Kabupaten Probolinggo masih jauh dibawah indeks pembangunan Jawa Timur. Oleh karena itu perlu adanya usaha lebih dari pemerintah daerah untuk menaikkan indeks pembangunan manusia agar dapat naik menjadi daerah dengan kategori tinggi agar kemakmuran manusia juga menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan manusia yang lebih baik diperlukan fasilitas pendidikan serta

kesehatan yang memadai. Pembenahan dasar melalui pendidikan merupakan langkah yang paling penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan pendidikan yang baik pula individu dapat meningkatkan keterampilan, wawasan, serta peluang kerja yang pada akhirnya kemudian dapat ikut andil pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

UNDP atau *United Nations Development Programme* menggunakan IPM sebagai landasan untuk mengukur kemampuan SDM pada suatu wilayah. Adapun beberapa faktor sebagai tolak ukurnya adalah angka harapan hidup atau seberapa lama hidup, rata-rata lama sekolah atau rata-rata individu yang bersekolah dan standar hidup layak. Beberapa aspek ini memiliki keterkaitan yang terhubung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu hal yang berperan dalam meningkatkannya adalah upah minimum. Upah yang memadai dapat memperkuat daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar dengan lebih baik.

Pendapatan yang lebih tinggi juga mendukung pemenuhan gizi yang lebih optimal, akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih berkualitas, serta peluang pendidikan yang lebih luas. Akumulasi dari berbagai aspek tersebut berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup yang lebih baik yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang mereka peroleh. Upah yang diterima menjadi sumber utama penghasilan bagi individu. Jika terjadi peningkatan dalam jumlah pendapatan, hal ini secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021).

Apabila seseorang memperoleh pendapatan atau upah yang lebih tinggi, ia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan serta penghasilan atau pendapatan. Penghasilan atau pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan perkapita, yakni rata-rata penghasilan yang dihitung berdasarkan total penghasilan disuatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk daerahnya. Pendapatan per kapita juga menjadi indikator daya beli masyarakat di daerah, di mana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat kebutuhan untuk pengeluarannya.

Grafik 1. 3 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo (data diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas menunjukkan bahwa upah minimum dari Kabupaten Probolinggo menempati urutan ke 11 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Upah minimum pada Kabupaten tersebut mengalami kenaikan dan kestabilan pada tiap tahunnya. Kenaikan upah minimum akan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, memperbaiki kesejahteraan pekerja, serta memperluas jangkauan terhadap berbagai kebutuhan yang mendasar seperti keperluan pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Upah minimum Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 sebesar Rp2.753.265 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Kota Probolinggo yang sebesar Rp2.576.240. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua wilayah berada dalam satu kawasan geografis yang berdekatan, terdapat perbedaan dalam penetapan standar upah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi lokal seperti

kebutuhan hidup layak, struktur industri, serta dinamika pasar tenaga kerja masing-masing daerah.

Kemudian daripada itu, kenaikan pendapatan juga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas hidup serta Indeks Pembangunan Manusia. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan yang layak, yang pada gilirannya memperkuat kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Kemudian, pengangguran merupakan isu makroekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Masalah ini sering menjadi topik utama dalam salah satu masalah utama dalam masyarakat, di mana para pemangku kebijakan berupaya merumuskan strategi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengangguran terbuka sendiri merujuk pada bagian dari angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan atau dalam proses mencari peluang kerja (Syadina Khumaerah, 2022).

Pengangguran juga sangat berdampak pada penurunan kualitas hidup seseorang, terutama dalam aspek pendidikan dan standar hidup yang layak dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika seseorang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, maka pemenuhan kebutuhan hidupnya akan menjadi tantangan. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Berkurangnya penghasilan

masyarakat akibat pengangguran menyebabkan daya beli menurun, sehingga akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan dan menstabilkan kualitas sumber daya manusia menjadi terbatas. Hal ini cukup berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kabupaten Probolinggo ialah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan TPT terendah ke-6 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, TPT adalah jumlah persentase pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja yang mencerminkan sejauh mana tenaga kerja terserap dalam pasar kerja. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa sejumlah besar angkatan kerja sudah mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran pada Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan pada tahun 2021-2023. Dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami 1,09% kenaikan dikarenakan pandemi Covid-19, kemudian menurun pada tahun selanjutnya. Kabupaten Probolinggo memiliki rata-rata tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo. Hal ini menandakan bahwa meskipun masyarakat pada suatu daerah semuanya bekerja, tidak dapat dipungkiri bahwa tetap akan ada daerah yang tertinggal.

Untuk itu perlunya dorongan dan upaya dari pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi pada masyarakatnya, agar mampu naik menjadi daerah dengan pembangunan manusia dengan kategori yang tinggi sehingga dapat memakmurkan kondisi masyarakatnya. Untuk menaikkan hal tersebut pemerintah perlu untuk meningkatkan fokus pada pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, serta pendapatan. Jika pendapatan tidak cukup, masyarakat menjadi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya sangat diperlukan yang pada dasarnya yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Ketidakmampuan individu akan menghambat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, serta kehidupan yang layak.

Akan tetapi meskipun tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Probolinggo cenderung rendah, hal tersebut tidak cukup untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Probolinggo. Meskipun upah minimum yang tergolong relatif tinggi serta jumlah pengangguran yang rendah tidak menyangkal akan adanya kemiskinan pada kabupaten ini. Kemiskinan tidak hanya sekadar keterbatasan finansial atau rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, rendahnya kualitas kesehatan, minimnya tingkat pendidikan, ketidakadilan dalam sistem hukum, rentannya individu terhadap tindak kejahatan, serta ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan kekuasaan. Selain itu, kemiskinan juga menghambat individu dalam mengambil keputusan dan menentukan arah hidupnya secara mandiri (Mononimbar et al., 2022).

Kemiskinan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia, mengingat permasalahan ini bersifat kompleks dan berakar pada rendahnya daya beli masyarakat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mengakibatkan aspek lain, seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan, sehingga semakin memperburuk kualitas hidup individu serta menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan dan kemiskinan memiliki keterkaitan erat, karena kondisi seseorang dapat dikategorikan miskin atau tidak bergantung pada sejauh mana ia mampu memenuhi standar kesejahteraan yang telah ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih menempati urutan tertinggi ke-5 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam mengukur jumlah penduduk miskin di Indonesia dilakukan dengan menetapkan Garis Kemiskinan (GK) sebagai batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Data pengeluaran rumah tangga dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapitanya berada di bawah GK. Persentase penduduk miskin dihitung menggunakan Head Count Index (P0), serta dilengkapi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah.

Kabupaten Probolinggo mengalami permasalahan yang kontradiktif dalam pembangunan manusia dan ekonomi, berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa

nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah ke-3 dari 38 Kabupaten/Kota diseluruh provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, upah minimum tergolong relatif cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah memiliki pekerjaan. Namun meskipun banyak warga yang bekerja dan menerima upah yang relatif cukup besar, namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa memiliki pekerjaan dan memiliki upah minimum yang baik belum tentu sebanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan di masyarakat.

Oleh karena itu, sejalan dengan (Faizin, 2021) bahwa upah minimum yang berlaku pada suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan. Karena ketika upah minimum naik maka daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian (Alifah & Imaningsih, 2022) karena tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo, karena pengangguran di daerah Kabupaten Probolinggo cenderung rendah yang mempunyai artian bahwa meskipun banyak yang bekerja pada daerah tersebut akan tetapi masyarakat masih tidak bisa memenuhi kesejahteraannya. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan (Saputra & Lubis, 2023) bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, jika kemiskinan semakin naik maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka penulis membuat penelitian yang berjudul “Analisis Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang yang disampaikan diatas sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Upah Minimum di Kabupaten Probolinggo terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Probolinggo terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah pengaruh Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang akan diperolah dari penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian yang akan didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Bagi para sarjana dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu tentang upah, kemiskinan, pengangguran, dan IPM di daerah lain.
2. Bagi pemerintah memberikan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif untuk meningkatkan IPM dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Penulis berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, serta jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo.